

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Asmarawati, Tina, 2014, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Beban Penjara Sebagai Wahana Resosialisasi Narapidana*, Newsletter DKPP, edisi 8, Vol. 3.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Effendi, Jonaedi, Widodo, Ismu Gunadi, dan Lutfianingsih, Fifit Fitri, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Kencana.
- Efritadewi, Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Riau, Umrah Press.
- Fakhruzy, Agung, 2019, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, Pamekasan, Duta Media.
- Kadarudin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*, Formaci, Semarang.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lubis, Mayang Sari, 2018, *Metodologi Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mansyur, Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustitia Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Panjaitan, Sarbutin, 2018, *Auditorium Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublish.
- Safa'at, Muchamad Ali, 2014, *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*, Malang, Brawijaya Press.

- Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar, Social Politic Genius.
- Suadi, Amran, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta, Prenadamedia.
- Susilo, Erwin, 2020, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi, Dan/Atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Press, Depok.
- Warsiman, 2021, *Pengaturan Pidana Mati Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bogor, Guepedia.
- Yudoprakoso, Paul W., 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pidanaan Korporasi*, Yogyakarta, Kanisius.
- Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Tindak Pidana.

C. Karya Tulis Ilmiah.

1. Jurnal.

Cornelius, Arilsaman dan Harafa, Beniharmoni, 2021, *Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, <http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v8i1>.

Capera, Brilian, 2021, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

Hartini, Sri, 2010, *Kajian tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pada era reformasi*, Jurnal Civics, Vol. 7, No. 1, <https://doi.org/10.21831/civics.v7i1.3460>.

Waidin, 2010, *Perspektif Hukum Dan Kewajiban Keadilan Terhadap Kasuas Buah Randu Di Kabupaten Batang*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1.

Maulana, Irvan dan Agusta, Mario, 2021, *Konsep Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Vol. 2 No. 2, <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.

Krisnalita, Louisa Yesami dan Wirghalia, Dinda, 2020, *Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa Atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif*, Binamulia Hukum, Vol. 9, No. 2, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.124>

2. Skripsi Tesis.

Manalu, Matin Andriano, 2019, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Korban Bujuk Rayu Pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl)*, Tesis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Yuniar, Nabila Ayu, 2019, *Pidana Kerja Sosial Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, Tesis, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tanuwijaya, William, 2019, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

D. Sumber-Sumber Lain.

1. Wawancara.

Hasil wawancara kepada Iptu Ni Luh Putu Mega M. unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan pada Tanggal 02 Februari 2022.

2. Internet.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana>, diakses 20 April 2022 Pukul 00.43 WIB.

<https://www.ohchr.org/en/taxonomy/term/736>, diakses tanggal 22 April 2022, pukul 02.05 WIB.

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ybDX96mb-kasus-kdrt-meningkat-selama-2021>, diakses Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 21.22 WIB

<https://www.youtube.com/watch?v=MdlEpm24bi8>, diakses Pada tanggal 25 April 2022, pukul 03.15 WIB

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya-lt582d807d2f16c#_ftn4, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 18.22 WIB.

<https://rri.co.id/jakarta/urban/804981/polda-jabar-tunda-gelar-perkara-khusus>, diakses tanggal 25 Mei 2022, pukul 21.55 WIB.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/27/polisi-tak-perlu-takut-gelar-perkara-khusus>, diakses 2 Juni 2022 Pukul 20.01 WIB.